

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169TAHUN 2025
TENTANG
KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN
CALON PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 718) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 419);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN CALON PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan kurikulum dan silabus pelatihan calon pengawas Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2025
KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169 TAHUN 2025

TENTANG

KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN CALON PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

KURIKULUM PELATIHAN CALON PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

Nama : Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal

Kompetensi : Membentuk Pengawas JPH yang Profesional

No	Materi Pelatihan	Pokok Bahasan	JP OJT1	JP IST1	JP OJT2	JP IST2
I	**KELOMPOK DASAR**					
1	Penguatan Prioritas Nasional dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)	1. Prioritas Nasional Nomor 8 2. Implementasi Prioritas Nasional Nomor 8 dalam penyelenggaraan JPH	1	0		
2		1. Konsep moderasi beragama	1	0		

	Sumber Daya Manusia Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	2. Wawasan kebangsaan 3. Aparatur Sipil Negara BERAKHLAK 4. Kode etik Pegawai BPJPH				
3	Sumber Daya Manusia Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	1. Kebijakan umum pengawasan JPH 2. Pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia Pengawas JPH 3. Jenis-jenis pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengawas JPH	1	0		
	Jumlah		**3**	**0**	**0**	**0**
II	**KELOMPOK INTI**					
1	Konsep Dasar Pengawasan JPH dan Regulasi terkait Penyelengaraan JPH	1. Konsep dasar pengawasan JPH 2. Tata Kelola sumber daya manusia Pengawas JPH 3. Regulasi penyelenggaraan JPH 4. Urgensi peraturan penyelenggaraan JPH 5. Perkembangan penerapan regulasi JPH	1	2		

2.	Konsep Halal Haram dan Fatwa Kehalalan Produk	1. Prinsip halal dan haram dalam Hukum Islam 2. Produk halal menurut syariat Islam 3. Dalil-dalil produk halal dalam syariat Islam 4. Perlindungan konsumen dalam produk halal 5. Urgensi produk halal menurut Syariat Islam 6. Contoh-contoh produk halal dan haram 7. Mekanisme penetapan fatwa produk halal	1	3		
3.	Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	1. Asas SJPH 2. Kriteria SJPH a. Komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi produk halal b. Bahan- bahan yang digunakan dalam PPH c. Ketentuan untuk pelaksanaan PPH d. Ketentuan produk sesuai persyaratan SJPH e. Ketentuan pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjaga kesinambungan kehalalan produk	2	6		

		3. Informasi Terdokumentasi				
4.	Titik Kritis kehalalan Produk	1. Konsep dasar kehalalan produk 2. Titik-titik kritis kehalalan dalam proses produksi 3. Titik kritis kehalalan dalam rantai pasok bahan baku produk 4. Bahan-bahan yang memiliki titik kritis kehalalan 5. Langkah langkah tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Kehalalan	1	3		
5.	Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*	1. Persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui skema *self declare* 2. Alur Sertifikasi halal melalui skema *self declare* 3. Tata cara pengajuan sertifikasi halal skema *self declare*	1	3		
6.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal Skema *Self Declare*	1. Prosedur akademis penetapan fatwa Halal 2. Prosedur administrasi penetapan fatwa halal 3. Prosedur penetapan fatwa halal melalui mekanisme *self declare*	1	3		

7.	Sertifikasi Halal Skema Reguler	1. Persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui skema reguler 2. Alur sertifikasi halal melalui skema reguler 3. Tata cara pengajuan sertifikasi halal skema reguler	1	3		
8.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal Skema Reguler	1. Prosedur akademis penetapan fatwa halal 2. Prosedur administrasi penetapan fatwa halal 3. Prosedur penetapan fatwa halal melalui mekanisme reguler	1	2		
9.	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN)	1. Gambaran umum akreditasi dan kerjasama saling pengakuan Sertifikat Halal antara BPJPH dan lembaga halal luar negeri 2. Persyaratan registrasi SHLN 3. Alur Registrasi SHLN 4. Tata cara pengajuan Registrasi SHLN melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL)	1	2		
10.	Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pengawas JPH	1. Kedudukan, Tanggung Jawab, danKlasifikasi/Rumpun Jabatan	1	2		

		2. Tugas dan ruang lingkup jabatan 3. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 4. Pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi				
11.	Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha dan Produk	1. Jenis- jenis pengawasan pelaku usaha dan produk 2. Objek pengawasan pelaku usaha dan produk 3. Tahapan pengawasan pelaku usaha dan produk mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 4. Tata cara pengambilan keterangan kepada Pelaku usaha 5. Mekanisme pengisian Instrumen pengawasan Pelaku Usaha dan Produk 6. Contoh-contoh kasus sesuai instrumen Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk	1	6		
12.	Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH)	1. Jenis- jenis pengawasan LPH dan LPPPH 2. Objek pengawasan LPH dan LPPPH 3. Tahapan pengawasan LPH dan LPPPH mulai dari	1	6		

		perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 4. Tata cara pengambilan keterangan kepada LPH dan LPPPH 5. Mekanisme pengisian Instrumen pengawasan LPH dan LPPPH 6. Contoh-contoh kasus sesuai instrumen Pengawasan LPH dan LPPPH				
13	Pengambilan Contoh dan Pengujian Laboratorium	1. Gambaran umum pengambilan contoh 2. Gambaran umum pengujian kehalalan produk 3. Hasil pengujian kehalalan produk	1	3		
14	Temuan dan/atau Laporan Aduan	1. Tindak lanjut aduan dan temuan terkait dugaan pelanggaran JPH 2. Contoh-contoh Temuan dan/atau Laporan 3. Tindak lanjut contoh-contoh Temuan dan/atau Laporan Aduan	1	3		
	Jumlah		**15**	**47**	**0**	**0**
III	**KELOMPOK PENUNJANG**					

1	*Overview*	1. Target output pelatihan 2. Tata-tertib pelatihan 3. Hak dan kewajiban peserta pelatihan 4. Tahapan-tahapan kegiatan pelatihan 5. Proses penilaian dan kelulusan atau ketuntasan pelatihan		1		
2	*Building Learning Commitment*	1. Menjelaskan konsep diri dan orang Lain 2. Menjelaskan *experiential learning cycle* 3. Menyusun komitmen belajar 4. Membentuk Perangkat Kelas		3		
3	Evaluasi Program	Evaluasi program		1		
4	Rencana Tindak Lanjut Program Pengawasan	1. Rencana Tindak Lanjut (persiapan surat tugas, instrumen pengawasan, berita acara pengawasan) 2. Pelaksanaan Pengawasan: (pemeriksaan lapangan, pengisian instrumen, pengisian berita acara) 3. Penyusunan Laporan Hasil OJT2		2		
5	Ujian Online Mandiri (Awal dan Akhir)			1		

	Jumlah			**8**		
IV	**OJT2**					
1	Praktik Pengawasan JPH di Pelaku Usaha Mikro kecil	Pengawasan terhadap pelaku usaha mikro kecil yang telah bersertifikat Halal			12	
2	Praktik Pengawasan JPH terhadap Produk	Pengawasan terhadap Produk di pasar modern atau tradisional			12	
	Jumlah				**24**	
V	**IST2**					
1	Bimbingan Penyusunan Laporan (Pembimbing/Mentoring)					2
2	Uji Presentasi Laporan Praktek Lapangan					8
	Jumlah					**10**
		Total JP	**18**	**55**	**24**	**10**
		Total JP	**107**			

NO	MATA PELATIHAN	JP OJT1	JP IST1	JP OJT2	JP IST2	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
A.	**KELOMPOK DASAR**								
1.	Penguatan Asta Cita dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	1				Mengimplemen tasikan Asta Cita dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	1.1 Menguraikan nilai nilai Asta Cita Nomor 8. 1.2 Menjelaskan cara implementasi Asta Cita Nomor 8 dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.	1. Asta Cita Nomor 8 2. Asta Cita nomor 8 dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	1. RPJMN 2025-2029 2. Renstra BPJPH 2025-2029
2.	Nilai - Nilai SDM BPJPH	1				Memahami konsep Moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan ASN BERAKHLAK	2.1 Mendeskripsikan konsep moderasi beragama. 2.2 Menjelaskan wawasan kebangsaan. 2.3 Memberikan contoh ASN BERAKHLAK. 2.4 Menjelaskan kode etik Pegawai BPJPH.	1. Konsep Moderasi beragama 2. Wawasan kebangsaan 3. ASN BERAKHLAK 4. Kode etik Pegawai BPJPH	1. Moderasi Beragama (Lukman hakim Syaifuddin) 2. Pemantapan wawasan kebangsaan dalam persatuan bangsa (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI) 3. Modul LAN: *Core Values* ASN

									BERAKHLAK Tahun 2024
3.	Pengembangan Kompetensi SDM Pengawas JPH	1				Memahami kebijakan umum dan urgensi pelatihan Pengawas JPH	3.1 Menjelaskan kebijakan umum terkait Pengawasan JPH 3.2 Urgensi pelatihan dalam pengembangan Kompetensi Teknis Pengawas JPH 3.3 Menjelaskan jenis-jenis pengembangan Kompetensi SDM Pengawas JPH	1. Kebijakan umum Pengawasan JPH 2. Pelatihan dalam Pengembangan SDM Pengawas JPH 3. Jenis-jenis pengembangan 4. kompetensi SDM Pengawas JPH	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

									Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal 5. Peraturan Menteri Pendayagu naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal
	Jumlah A	**3**							

B.	**KELOMPOK INTI**								
1.	Konsep Dasar Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Regulasi terkait Penyelengaraan Jaminan Produk Halal (JPH)	1	2			Memahami konsep dasar pengawasan JPH dan Regulasi JPH	1.1 Menjelaskan konsep dasar pengawasan JPH 1.2 Mendeskripsi Kan tata kelola SDM Pengawas JPH 1.3 Menjelaskan regulasi terkait JPH 1.4 Menjelaskan urgensi regulasi JPH 1.5 Menjelaskan perkembangan penerapan Regulasi JPH	1. Konsep dasar pengawasan JPH 2. Tata Kelola SDM Pengawas JPH 3. Regulasi terkait JPH 4. Urgensi peraturan regulasi JPH 5. Perkembangan penerapan Regulasi JPH	1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal sebagaimana telah

									diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan

									Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal 11. KMA Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. 12. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan

									Keempat atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH 13. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal 14. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi LPH 15. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan 145 Tahun 2022 Penggunaan Label Halal Pada Produk yang telah

									Memperoleh Sertifikat Halal 16. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. 17. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

									18. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas 19. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 49 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penyembelihan Ruminansia dan Unggas 20. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Dengan Pengolahan 21. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 8 Tahun 2024

									tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal
2.	Konsep Halal Haram dan Fatwa Kehalalan Produk	1	3			Memahami konsep Halal Haram dan Fatwa menurut Syariat Islam	2.1 Menjelaskan prinsip Halal dan Haram dalam Hukum Islam 2.2 Menjelaskan produk Halal Menurut Syariat Islam 2.3 Menunjukan dalil-dalil produk halal dalam Syariat Islam 2.4 Menjelaskan perlindungan konsumen dalam produk halal	1. Prinsip Halal dan Haram dalam Hukum Islam 2. Produk Halal menurut syariat Islam 3. Dalil-dalil produk halal dalam Syariat Islam 4. Perlindungan konsumen dalam produk halal 5. Urgensi produk	1. Halal dan Haram dalam Islam, Dr Yusuf Qardhawi, Pustaka Iman 2. Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi, Farid Wajdi 3. Halal dan Haram dalam Islam, Ummul Qura, Muhammad Bin Shalih Al-Utsamain 4. Kumpulan Fatwa MUI

							2.5 Menjelaskan urgensi produk Jaminan Halal menurut Syariat Islam 2.6 Menunjukan contoh-contoh produk halal dan haram 2.7 Menjelaskan mekanisme penetapan Fatwa Produk Halal	Jaminan Halal menurut Syariat Islam 6. Contoh-contoh produk halal dan haram 7. Mekanisme penetapan Fatwa Produk Halal	
3.	Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	2	6			Memahami Asas SJPH, Kriteria SJPH, dan Informasi Terdokumentasi	4.1 Menjelaskan asas SJPH 4.2 Menjelaskan komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi produk halal 4.3 Menjelaskan bahan- bahan yang digunakan dalam PPH 4.4 Menjelaskan ketentuan untuk pelaksanaan proses produk halal (PPH)	1. Asas SJPH 2. Kriteria SJPH a. Komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi produk halal b. Bahan-bahan yang digunakan dalam PPH c. Ketentuan untuk pelaksanaan	1. Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMA 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari

							4.5 Menjelaskan ketentuan produk sesuai persyaratan SJPH 4.6 Menjelaskan ketentuan pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjaga kesinambungan kehalalan produk 4.7 Menjelaskan informasi Terdokumentasi	proses produk halal (PPH) d. Ketentuan produk sesuai persyaratan SJPH e. Ketentuan pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjaga kesinambungan kehalalan produk 3. Informasi Terdokumentasi	Kewajiban Bersertifikat Halal 4. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal 5. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas 6. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Dengan Pengolahan.
4.	Titik Kritis kehalalan Produk	1	3			Memahami titik kritis kehalalan	4.1 Menjelaskan konsep dasar kehalalan produk	1. Konsep dasar	1. Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang

						dalam proses produksi	4.2 Mengidentifikasi titik-titik kritis kehalalan dalam proses produksi 4.3 Mengidentifikasi titik kritis kehalalan dalam rantai pasok bahan baku produk 4.4 Mengidentifikasi bahan-bahan yang memiliki titik kritis kehalalan 4.5 Menerapkan langkah langkah tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Kehalalan	kehalalan produk 2. Titik-titik kritis kehalalan dalam proses produksi 3. Titik kritis kehalalan dalam rantai pasok bahan baku produk 4. Bahan-bahan yang memiliki titik kritis kehalalan 5. Langkah langkah tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan Kehalalan	Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal 4. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan pengolahan 5. Daftar Referensi Bahan-Bahan yang memiliki titik kritis halal dan substitusi bahan non halal, Penerbit KNEKS

									Tahun 2020 (Irwandi Jaswir, Dkk) 6. Kompilasi Fatwa MUI Tentang Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik 7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas 8. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 49 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penyembelihan Ruminansia dan Unggas 9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 147 Tahun 2022 tentang SKKNI Juru Sembelih Halal. 10. SNI 99002:2016 Pemotongan Halal Unggas

									11. SNI 99003:2018 Pemotongan Halal Ruminansia
5.	Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*	1	3			Memahami prosedur sertifikasi halal skema *self declare*	5.1 Menjelaskan persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui skema *self declare* 5.2 Menjelaskan alur Sertifikasi halal melalui skema *self declare* 5.3 Menjelaskan tata cara pengajuan sertifikasi halal skema *self declare*	1. Persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui skema *self declare* 2. Alur Sertifikasi halal melalui Skema *self declare* 3. Tata cara pengajuan sertifikasi halal skema *self declare*	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
6.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal Skema *Self Declare*	1	3			Memahami prosedur dan penetapan fatwa halal skema *self declare*	6.1 Menjelaskan Prosedur Akademis Penetapan Fatwa Halal 6.2 Menjelaskan Prosedur Administrasi Penetapan Fatwa Halal	1. Prosedur Akademis Penetapan Fatwa Halal 2. Prosedur Administrasi Penetapan Fatwa Halal 3. Prosedur Penetapan Fatwa Halal	1. Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi, Farid Wajdi 2. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan Iptek, K.H. Ma'ruf Amin, dkk.

							6.3 Menjelaskan Prosedur Penetapan Fatwa Halal melalui mekanisme *self declare*	melalui mekanisme Self Declare	
7.	Sertifikasi Halal Skema Reguler	1	3			Memahami prosedur Sertifikasi Halal Skema Reguler	7.1 Menjelaskan persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui skema reguler 7.2 Menjelaskan alur Sertifikasi halal melalui Skema Reguler 7.3 Menjelaskan tata cara pengajuan sertifikasi halal skema Reguler	1. Persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui skema reguler 2. Alur Sertifikasi halal melalui Skema Reguler 3. Tata cara pengajuan sertifikasi halal skema Reguler	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
8.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal Skema Reguler	1	2			Memahami prosedur dan penetapan fatwa halal Skema Reguler	8.1 Menjelaskan Prosedur Akademis Penetapan Fatwa Halal 8.2 Menjelaskan Prosedur	1. Prosedur Akademis Penetapan Fatwa Halal 2. Prosedur Administrasi	1. Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi, Farid Wajdi 2. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

							Administrasi Penetapan Fatwa Halal 8.3 Menjelaskan Prosedur Penetapan Fatwa Halal melalui mekanisme Reguler	Penetapan Fatwa Halal 3. Prosedur Penetapan Fatwa Halal melalui mekanisme Reguler	Bidang POM dan Iptek, K.H. Ma'ruf Amin, dkk.
9.	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN)	1	2			Memahami prosedur dan alur registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	9.1 Mendeskripsikan gambaran umum akreditasi dan kerjasama saling pengakuan Sertifikat Halal antara BPJPH dan LHLN 9.2 Menjelaskan Persyaratan Registrasi Sertifikat Halal Luar negeri 9.3 Menjelaskan Alur Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri 9.4 Menguaraikan tata cara pengajuan Registrasi Sertifikat Halal	1. Gambaran umum akreditasi dan kerjasama saling pengakuan Sertifikat Halal antara BPJPH dan LHLN 2. Persyaratan Registrasi Sertifikat Halal Luar negeri 3. Alur Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri 4. Tata cara pengajuan	Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang prosedur pelaksanaan layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

							Luar Negeri melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL)	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri melalui SiHalal	
10.	Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pengawas JPH	1	2			Memahami Tugas dan Fungsi serta ruang lingkup Jabatan Fungsional Pengawas JPH	10.1 Menjelaskan Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan 10.2 Menjelaskan tugas dan ruang lingkup jabatan 10.3 Menjelaskan mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan 10.4 Menjelaskan Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi	1. Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan 2. Tugas dan ruang lingkup jabatan 3. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan 4. Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025

									tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal
11.	Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha dan Produk	1	6			Memahami pedoman dan ruang lingkup pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk	11.1 Menjelaskan jenis- jenis pengawasan pelaku usaha dan produk 11.2 Mendeskripsikan objek pengawasan pelaku usaha dan produk 11.3 Menjelaskan tahapan pengawasan pelaku usaha dan produk mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 11.4 Menjelaskan tata cara pengambilan	1. Jenis- jenis Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk 2. Objek Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk 3. Tahapan Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk mulai dari perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

							keterangan kepada Pelaku usaha 11.5 Menjelaskan mekanisme pengisian Instrumen pengawasan Pelaku Usaha dan Produk 11.6 Mendeskripsikan contoh-contoh kasus sesuai instrumen Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk	4. Tata cara pengambilan keterangan kepada Pelaku usaha 5. Mekanisme pengisian Instrumen pengawasan Pelaku Usaha dan Produk 6. Contoh-contoh kasus sesuai instrumen Pengawasan Pelaku Usaha dan Produk	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal 6. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan LP3H dan P3H 7. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengawasan JPH

12.	Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH)	1	6			Memahami Pedoman dan Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap LPH dan LPPPH	12.1 Menjelaskan jenis- jenis Pengawasan LPH dan LPPPH 12.2 Mendeskripsikan objek Pengawasan LPH dan LPPPH 12.3 Menjelaskan tahapan Pengawasan LPH dan LPPPH mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 12.4 Menjelaskan tata cara pengambilan keterangan kepada LPH dan LPPPH 12.5 Menjelaskan mekanisme pengisian Instrumen pengawasan LPH dan LPPPH 12.6 Mendeskripsikan contoh-contoh kasus sesuai	1. Jenis- jenis Pengawasan LPH dan LPPPH 2. Objek Pengawasan LPH dan LPPPH 3. Tahapan Pengawasan LPH dan LPPPH mulai dari perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan 4. Tata cara pengambilan keterangan kepada LPH dan LPPPH 5. Mekanisme pengisian Instrumen pengawasan LPH dan LPPPH 6. Contoh-contoh kasus	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal 4. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembinaan LPPPH dan PPPH 5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi LPH 6. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengawasan JPH

							instrumen Pengawasan LPH dan LPPPH	sesuai instrumen Pengawasan LPH dan LPPPH	
13	Pengambilan Contoh dan Pengujian Laboratorium	1	3			Memahami gambaran umum Pengambilan contoh dan gambaran umum pengujian Kehalalan Produk	13.1 Mendeskripsikan gambaran umum pengambilan contoh 13.2 Mendeskripsikan gambaran umum pengujian Kehalalan Produk 13.3 Mendeskripsikan hasil pengujian Kehalalan Produk	1. Gambaran umum pengambilan contoh 2. Gambaran umum pengujian Kehalalan Produk 3. Hasil pengujian Kehalalan Produk	1. Peraturan Kepala Badan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 135 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kehalalan 2. SNI 17025 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratoroium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi 3. SNI 9278 Tahun 2024 Metode Deteksi DNA Spesifik Babi pada Produk Pangan Mengandung Gelatin-Metode Kualitatif Realtime PCR menggunakan Hidrolysis Probe 4. SNI-8965-2021 Metode Deteksi dan Kuantifikasi

									Etanol pada Produk Minuman 5. Analisis biomarker molekuler — Deteksi bahan turunan hewan pada bahan pangan dan bahan pakan menggunakan real-time PCR — Bagian 3: Metode deteksi DNA babi (ISO/TS 20224-3:2020, IDT, Eng)
14.	Temuan dan/atau Laporan Aduan	1	3			Memahami tata cara penanganan Temuan dan/atau Laporan Aduan	14.1 Menjelaskan tindak lanjut aduan dan temuan terkait dugaan pelanggaran JPH 14.2 Mendeskripsikan contoh-contoh Temuan dan/atau Laporan 14.3 Menjelaskan tindak lanjut contoh-contoh Temuan dan/atau Laporan Aduan	1. Tindak lanjut aduan dan temuan terkait dugaan pelanggaran JPH 2. Contoh-contoh Temuan dan/atau Laporan 3. Tindak lanjut contoh-contoh Temuan dan/atau	1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal 2. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengawasan JPH

								Laporan Aduan	
	Jumlah B	**15**	**47**						

C.	**KELOMPOK PENUNJANG**								
1.	*Overview*		1			Memahami target dan cara mencapai kompetensi pelatihan	1.1 Menyebutkan kompetensi yang harus dicapai pasca pelatihan 1.2 Menyebutkan tata tertib 1.3 Menyebutkan hak dan kewajiban peserta 1.4 Menguraikan langkah-langkah pencapaian target kompetensi pelatihan 1.5 Menjelaskan proses penilaian dan kelulusan peserta	1. Target Output Pelatihan 2. Tata Tertib Pelatiha 3. Hak dan Kewajiban Peserta Pelatihan 4. Tahapan-tahapan Kegiatan Pelatihan 5. Proses Penilaian dan Kelulusan atau Ketuntasan Pelatihan	
2.	*Building Learning Commitment*		3			Menyusun Komitmen Belajar	2.1 Menjelaskan konsep diri dan Orang Lain	1. Menjelaskan konsep diri dan Orang Lain 2. Menjelaskan *experiential*	*Building Learning Commitment* (Jakarta: LAN-RI)

							2.2 Menjelaskan *experiential learning cycle* 2.3 Menyusun komitmen belajar 2.4 Membentuk Perangkat Kelas	*learning cycle* 3. Menyusun komitmen belajar 4. Membentuk Perangkat Kelas	
3.	Evaluasi Program		1			Mengevaluasi program pelatihan	3.1 Melaksana kan penilaian kepada peserta 3.2 Melaksana kan penilaian kepada panitia 3.3 Melaksana kan penilaian kepada widyaiswara/n arasumber	Evaluasi Program	1. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan 2. Kurikulum Pelatihan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
4.	Rencana Tindak Lanjut Program Pengawasan (RTLPP)		2			Menyusun rancangan program yang akan dilaksanakan pada saat OJT2	4.1 Menjelaskan langkah penyusunan rencana tindak lanjut 4.2 Menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang akan	1. Rencana Tindak Lanjut: Persiapan: Surat Tugas, Instrumen Pengawasan, Berita Acara Pengawasan	Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Panduan Pelaksanaan Pelatihan Pengawas JPH

							dilaksanakan pada saat OJT2	2. Pelaksanaan Pengawasan :(Pemeriksaan lapangan, Pengisian instrumen, pengisian berita acara) 3. Penyusunan Laporan Hasil OJT2	
5.	Ujian Online Mandiri (Awal dan Akhir)		1			-	-	-	-
	Total IJT-1		**8**						
1	Praktik Pengawasan JPH di Pelaku Usaha Mikro kecil			12		Menerapkan pengetahuan tentang pengawasan pada pelaku usaha mikro kecil	1. Menyusun rencana Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha mikro kecil 2. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaku usaha Mikro Kecil 3. Menyusun Laporan hasil Pengawasan	Pengawasan terhadap pelaku usaha mikro kecil yang telah bersertifikat Halal	

							terhadap pelaku usaha mikro kecil		
2	Praktik Pengawasan JPH terhadap Produk			12		Menerapkan pengetahuan tentang pengawasan terhadap Produk	2.1 Menyusun rencana pelaksanaan pengawasan terhadap produk 2.2 Melaksana kan Pengawasan terhadap Produk 2.3 Menyusun Laporan hasil pengawasan terhadap produk	Pengawasan terhadap produk di pasar modern atau tradisional, resto, mall, pabrik.	
	Total OJT			**24**					

1	Bimbingan Penyusunan Laporan (Pembimbing/Mentoring)				2	-	-	-	-
2	Uji Presentasi Laporan Praktek Lapangan				8	-	-	-	-
	Total IST-2				**10**				
	Total In-On-In	**18**	**55**	**24**	**10**				
	Total	**107**							

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,

AHMAD HAIKAL HASAN